

HARIAN  
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK  
01 MARET 2011

PENDIRI:  
Ardi, S.Si, Apt

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA  
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

# Baubau Post

Baubaupost.com

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

Jumat  
07 Maret 2025

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

## Walikota Baubau H Yusran Fahim Tegaskan Akan Mempercepat Proses Penetapan Sekda Definitif Kemungkinan Melalui Asesmen Kembali



Walikota dan Wawali Baubau Yusran-Hamsinah Tiba di Bandara betoambari disambut meriah dengan tarian linda

Pewarta: Ardi, Baubau Post, Durasi Times

BAUBAU, BP- Jabatan Sekda Kota Baubau yang kini masih lowong dan sementara jabatan sekda Baubau diisi pelaksana harian (Plh) menjadi salah satu fokus 100 hari kerja Walikota Baubau dan Wakil Walikota Baubau H Yusran Fahim-Wa Ode Hamsinah Bolu.

Yusran kepada awak media di Rujab Walikota Baubau mengatakan akan mempercepat proses penetapan sekertaris daerah definitif Kota Baubau. Dia pun sudah

Lanjutkan ke Hal: 7

Apa itu Program Quick Win Yang Jadi Agenda 100 Hari Kerja H Yusran-Wa Ode Hamsinah Untuk Bangun Baubau



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Selama 100 hari ke depan, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE dan Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc telah mempunyai program untuk memberikan hasil nyata dalam waktu singkat.

Program tersebut dinamakan Quick Win yang akan segera dilaksanakan sesuai dengan visi misi Wali Kota dan

Lanjutkan ke Hal: 7

Bupati Buton Utara Afirudin Mathara akan Bangun Hubungan Baik dengan Pers

Laporan: Kasrun

BURANGA, BP-Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara menegaskan, pentingnya peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta percepatan dan efektivitas

Lanjutkan ke Hal: 7



GEMA Busel Demonstrasi di Hari Pertama Bupati Buton Selatan Muh Adios Berkantor, Aspirasikan Dualisme Sekda Hingga jalan Rusak dan Listrik 24 Jam



Bupati Busel Muh Adios dan Wakilnya Muh Risawal Menerima Aspirasi dari GEMA Busel

Pewarta: Eron

BUSEL, BP- Massa Aksi GEMA Buton Selatan melakukan aksi dihari pertama Bupati Busel Muh Adios dan Wakilnya Risawal. GEMA Busel menyampaikan aspirasinya agar dibawah kepemimpinan Mub Adios-Risawal terjadi percepatan pembangunan di negeri Gajah Mada.

Demonstrasi yang dilakukan pada Rabu 5 Maret 2025 itu disambut

Lanjutkan ke Hal: 7

Afirudin Mathara Apresiasi Gubernur Sultra Masukkan Buton Utara Dalam Program 100 Hari Kerja



Laporan: Kasrun

BURANGA, BP-Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara menegaskan,

komitmennya untuk menuntaskan perbaikan Jalan Provinsi di Buton Utara dan tidak akan menyerah sebelum peker-

jaan rampung. "Inshaallah kami tidak akan pantang menyerah dan pantang mundur se-

Lanjutkan ke Hal: 7

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA  
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post  
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi  
per Tanggal 30 Desember 2022



Andina Latief, SKM  
DIREKTUR



## Walikota Baubau H Yusran Fahim Tegaskan Akan Mempercepat Proses Penetapan Sekda Definitif Kemungkinan Melalui Asesmen Kembali

mengetahui sebenarnya proses selang jabatan Sekda Kota Baubau itu sudah final dimasa Pj Walikota Baubau Dr Muh Rasman Manafi yang menghasilkan tiga nama yaitu La Ode Aswad, Suarmawati, dan Sitti Munawar. Namun menurut H Yusran Fahim masih ada yang perlu dibenahi lagi.

“Kemungkinan akan ada asesmen kembali untuk jabatan Sekda definitif. Akan sesegera mungkin dan secepat mungkin diproses,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Walikota Baubau terpilih H Yusran Fahim mengatakan akan fokus pada program yang telah direncanakan dengan potensi yang ada, Belum berpikir untuk melakukan perombakan terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Meski demikian H Yusran mengatakan bisa saja ada perombakan bila diperlukan, “Tapi kita juga tidak bisa nafikan, jika ada perombakan. Karena yang kita butuhkan orang yang betul-betul

mau kerja. Buat apa dia berada di situ, tapi tidak kerja. Jadi lebih bagus diganti,” ungkapnya.

Dia pun menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan terpengaruh oleh titipan atau pandangan negatif. “Kita tidak bisa melihat, ini tidak bagus, ada titipan dari ini. Tidak ada seperti itu. Tapi kalau seperti terkait Pilkada yang lalu, kemudian kita mau rombak. Tidak begitu,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Walikota Baubau

Wa Ode Hamsina Bolu. Dia mengatakan bahwa pemerintahan Yusran-Hamsina ingin berlari cepat dan membutuhkan orang-orang yang punya kompeten.

“Kami akan melakukan pengkajian sebelum melakukan perombakan. Jadi sekiranya kita masuk di dalam dan kita bisa melakukan pengkajian. Bagaimana kita mau merombak kalau kita belum ada di dalam? kita belum tahu dan itu tidak bijaksana,” ujarnya. (\*)

## Apa itu Program Quick Win Yang Jadi Agenda 100 Hari Kerja H Yusran-Wa Ode Hamsinah Untuk Bangun Baubau

Wakil Wali Kota Baubau terpilih periode 2025-2030.

Dalam press release Wali Kota Baubau tertanggal 1 Maret 2025, H Yusran Fahim mengungkapkan, yang pertama dilakukan pada program quick win adalah penataan fisik dan infrastruktur sebagai wajah Kota melalui pengelolaan sampah dan penghijauan, perbaikan jalan dan trotoar, penataan PKL di ruang publik dan peningkatan drainase pembersihan saluran air untuk mencegah banjir.

Kemudian kedua, penguatan tata kelola dan regulasi kawasan melalui penerapan aturan zonasi antara lain penertiban bangunan liar dan reklame ilegal, kampanye kebersihan secara massif, penghijauan serta edukasi dan pelibatan masyarakat, komunitas dan pelaku usaha untuk menjaga kebersihan Kota Baubau.

Serta yang ketiga, peningkatan keamanan, ketertiban, stabilitas ekonomi terutama pengendalian inflasi pada bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446

H/2025 M.

“Mari kita bersama-sama melangkah menuju masa depan yang lebih baik, membangun kota Baubau sebagai kota Budaya yang ramah, cerdas, Sejahtera dan bermartabat. Saya siap mengabdikan diri sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berlandaskan kepentingan bersama,” ucapnya.

“Sekali lagi, terima kasih atas doa, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan. Semoga Allah Subhana Wataallah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini juga menyampaikan penuh rasa syukur dan kerendahan hati serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Baubau yang telah memberikan dukungan, doa, dan kepercayaannya.

Amanah yang telah diberikan ini merupakan tanggung jawab besar yang akan diembannya dengan sepenuh hati demi

kemajuan dan kesejahteraan Kota Baubau. Amanah ini juga merupakan komitmen untuk terus bekerja keras, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Dengan semangat KERJA BERSAMA, pihaknya percaya bahwa visi misi pembangunan Baubau dapat terwujud dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Melalui strategi pencapaian adaptif, inovatif dan produktif, akan selalu memaksimalkan proses transformasi ke arah yang lebih baik, memproduksi terobosan baru yang efektif serta menghasilkan luaran yang maksimal sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dan kesejahteraan dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Sementara itu, terkait perbedaan pilihan pada saat Pemilihan yang lalu, Yusran menganggap itu merupakan salah satu bentuk langkah berdemokrasi yang baik dan harus menjadi momentum persatuan untuk

pembangunan Kota Baubau kedepan.

Tantangan pembangunan di segala lini akan semakin bervariasi dan kompleks dan tentunya diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Stakeholder dan masyarakat.

H Yusran Fahim juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pj Wali Kota Baubau Dr. H. Muh Rasman Manafi, S.Pi, M.Si atas dedikasi kinerja selama 17 bulan menjabat di Kota Baubau dan telah meletakkan pondasi tata Kelola birokrasi dan pemerintahan yang cukup baik.

Beberapa poin yang akan diagenda dalam 2 minggu ke depan yaitu pelaksanaan serah terima jabatan bupati/walikota se Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Kemudian, bersama dengan legislative akan segera melaksanakan sidang Rapat Paripurna sesuai ketentuan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan hasil Pilkada serentak. (\*)

## Afirudin Mathara Apresiasi Gubernur Sultra Masukkan Buton Utara Dalam Program 100 Hari Kerja

belum Jalan Provinsi tuntas dikerjakan,” tulis Afirudin di akun Facebooknya pada Selasa, 4 Maret 2025.

Dalam kesempatan itu, Afirudin juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dan Wakil Gubernur, Ir. Hugua, yang telah memasukkan Buton Utara sebagai salah satu wilayah prioritas dalam program 100 hari kerja mer-

eka.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur & Wakil Gubernur Pak Andi Sumangerukka dan Pak Hugua yang telah menjadikan Buton Utara sebagai sasaran wilayah pelaksanaan program 100 hari kerja,” lanjutnya.

Menurut Afirudin, perhatian ini tidak terlepas dari pengalaman langsung Wakil Gubernur Ir. Hugua saat melakukan kam-

panye di Buton Utara beberapa waktu lalu.

“Saya meyakini betul ini adalah buah dari petualangan Pak Wagub Ir. Hugua saat kampanye di Buton Utara,” ungkapnya.

Pernyataan ini mendapat respons positif dari masyarakat Buton Utara yang berharap perbaikan infrastruktur, terutama jalan provinsi, segera terealisasi demi mendorong perekonomian dan kesejahteraan warga setempat. (\*)

## GEMA Busel Demonstrasi di Hari Pertama Bupati Buton Selatan Muh Adios Berkantor, Aspirasikan Dualisme Sekda Hingga jalan Rusak dan Listrik 24 Jam

baik oleh Bupati Busel Muh Adios. Massa menyampaikan aspirasinya mulai dari dualisme Sekda Buton selatan, perbaikan jalan di Kepulauan Siompu, aliran listrik di Kecamatan Kadatu, Batu Atas, dan Siompu), hingga jaringan telekomunikasi dan infrastruktur.

Korlab Gema Busel Isra meminta kepada Bupati terpilih agar listrik di Kecamatan kadatu dan batu Atas bisa menyala 24 jam sebagaimana di kecamatan lain yang ada di Busel. Begitu juga dengan perbaikan jalan di Kecamatan Siompu agar mendapat perhatian Pemerintah.

Bupati Busel Muh Adio pun menerima apa yang menjadi aspirasi GEMA Busel dan berjanji akan menyelesaikan beragam persoalan di Buton Selatan. “Tapi kasih kami kesempatan untk bekerja. Saya senang GEMA Busel menyampaikan aspirasinya dan aspirasi masyarakat itu harus direalisasikan,” tuturnya.

Bahkan Muh Adios menegaskan sebagai putra daerah ia berkomitmen akan melakukan sebuah perubahan kearah yang lebih baik untuk Kabupaten Buton Selatan.

“Saya harus tanggap, posisi dan perjuangan kalian. Saya adalah Bupati Buton Selatan saya

akan bekerja lebih baik, ingat apa yang kalian tadi orasikan kasih kesempatan saya untuk bekerja,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Korlap GEMA Busel, Isra mengapresiasi respon positif yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati Busel yang menanggapi sejumlah aspirasi yang sudah disampaikan.

“Menurut kami teman-teman dari GEMA Busel respon Bupati sangat baik sekali karena memang dari beberapa kali, puluhan kali bahkan ratusan kali kami turun baru hari ini langsung kami ditemui Bupati Buton Selatan,” ucapnya. (\*)

## Bupati Buton Utara Afirudin Mathara akan Bangun Hubungan Baik dengan Pers

program pembangunan di daerah.

Hal ini disampaikan melalui akun Facebook resminya pada Selasa, 4 Maret 2025. Menurut Afirudin, kebebasan pers merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menilai, keberadaan insan pers sangatlah krusial dalam mengawal jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Insyaallah, Pemerintah Kabupaten Buton Utara akan membangun hubungan kemitraan yang baik, hubungan yang ideal dalam menyelaraskan pilar demokrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Buton Utara,” tulis Afiru-

din.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen pers di Buton Utara untuk terus berkolaborasi dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (\*)

## M Nuh: Biaya Sekolah Rakyat Gratis, Pakai Kurikulum Khusus



Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh memastikan Sekolah Rakyat tak akan dipungut biaya alias gratis untuk seluruh peserta didiknya.

JAKARTA-Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) Mohammad Nuh memastikan Sekolah Rakyat tak akan dipungut biaya alias gratis untuk seluruh peserta didiknya.

Nuh menjelaskan Sekolah Rakyat ini dikhususkan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang dibuka dari jenjang SD hingga SMA/SMK.

"Jangan sampai karena sekolah ini gratis dan seterusnya,

sekolahnya bagus, orang yang tidak miskin ngaku miskin, tidak boleh. Pastikan ini memang untuk warga yang miskin," kata Nuh di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (5/3).

Nuh juga menjelaskan Sekolah Rakyat akan berbentuk asrama atau boarding school. Nantinya sekolah ini akan menggunakan fasilitas milik Kemensos.

Ia juga mengatakan pihak Kementerian Pendidikan Dasar

dan Menengah (Kemendikdasmen) juga akan terlibat dari sisi perizinan, penyiapan guru dan kurikulum pendidikan.

Eks Mendikbud M Nuh Ditunjuk Jadi Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat

"Itu pun juga akan kita kembangkan kurikulum khusus karena mereka itu boarding. Dan juga tata kelolanya," kata dia.

"Tentu ada kurikulum nasional kita tetap plus. Jadi kurikulum nasional plus plus. Jelas ya," tam-

bahnya.

Di sisi lain, Nuh memberikan apresiasi gagasan dan ide dari Presiden Prabowo Subianto untuk memotong mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Ia menilai kunci kejayaan Indonesia adalah kaum dhuafa yang bangkit dari kemiskinan.

"Sehingga punya self confidence yang kuat. Punya masa depan yang sangat jelas melalui dunia pendidikan kita," kata Nuh.

Di tempat yang sama, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan anggaran pembentukan Sekolah Rakyat ini akan didukung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ya nanti kita akan koordinasi dulu dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota. Di daerah mana yang siap. Tentu anggarannya akan didukung oleh Presiden. Nanti kita lihat lah," kata Gus Ipul.(R)

## Kemendagri Sebut Masih Ada Pemda Belum Bisa Jelaskan Pendanaan PSU

### Laporan: Hasim

JAKARTA-Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut masih ada pemerintah daerah yang belum memberikan kejelasan ihwal kemampuan pendanaan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

Ia menyatakan bahwa Kemendagri terus berkoordinasi dengan 24 daerah yang diperintahkan MK untuk melakukan pemilihan ulang.

"Iya, jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan," kata Bima di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Bima menjelaskan Kemendagri secara intensif berkoordinasi



Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut masih ada pemerintah daerah yang belum memberikan kejelasan ihwal kemampuan pendanaan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

nasi dengan seluruh daerah tersebut. Salah satunya ialah menggelar pertemuan bersama pada siang hari ini.

"Dan nanti satu-satu akan kita datangi, kita telisik, kita lihat APBD-nya. Karena kalau dibilang tidak mampu, maka kita harus lihat apakah betul tidak mampu. Karena mungkin saja bisa digeser-geser gitu ya," ucapnya.

Bima menyatakan

jika pemerintah daerah terkait tak mampu menanggung biaya PSU, maka pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Ia menyebut pelaksanaan PSU itu juga memiliki tenggat waktu, sebagaimana yang tertuang dalam putusan MK.

"Tapi kita pastikan kita koordinasi semaksimal mungkin, agar PSU ini baik yang seluruhnya maupun sebagian bisa terseleng-

gara dengan baik," ujarnya.

Ia pun membicarakan peluang pendanaan dari APBN. Bima mengatakan bahwa ada mekanisme pembagaaan anggaran.

"Kita lihat sharingnya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN," ujarnya.\*

## Tim Hukum Hasto Protes Keras KPK Limpahkan Berkas Perkara hari Ini

### Laporan: Listar

JAKARTA-im hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melayangkan protes keras ke KPK karena akan melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan ke jaksa penuntut umum (tahap II) besok, Kamis (6/3).

Protes tersebut bukan tanpa alasan. Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan KPK tidak menghormati hak tersangka di mana pada Selasa (4/3) telah mengajukan tiga ahli hukum sebagai saksi meringankan atau a de charge untuk dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan.

"Kami tadi siang mendapatkan WA [WhatsApp] dari bagian informasi KPK yang menyampaikan bahwa besok hari Kamis akan ada tahap 2 untuk klien kami, Mas Hasto Kristiyanto," ujar Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3) petang.

"Ini yang perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya, kemarin kami sudah mengajukan permohonan untuk diperiksa saksi yang meringankan. Kami menghadirkan ahli yang meringankan sesuai dengan Pasal 65 KUHAP yaitu tersangka berhak untuk menghadirkan saksi a de charge," imbuhnya.

Ronny menyatakan informasi yang diberikan KPK siang ini membuat marah tim hukum sehingga memutuskan membuat surat protes atas tindakan sewenang-wenang penyidik KPK.

Sidang Praperadilan Kasus Suap Hasto Ditunda jadi 10 Maret

"Nah, karena mendapatkan informasi tersebut, maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenangan KPK, yang kami menilai bahwa KPK tidak punya komitmen terhadap KUHAP maupun Undang-

undang KPK itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," tutur Ronny.

Dia menambahkan tindakan yang dilakukan penyidik KPK menguatkan dugaan lembaga antirasuah menghindari Praperadilan yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, ini yang kami sudah melihat kecurigaan kami bahwa ingin mempercepat perkara ini untuk menghindari Praperadilan," ucap Ronny.

Media inisudah menghubungi Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto untuk mengkonfirmasi tahap II dan keberatan tersebut, namun dia akan menanyakannya ke penyidik terlebih dahulu.

Sebelumnya, pada Selasa (4/3), tim hukum Hasto mengajukan tiga ahli hukum sebagai saksi meringankan atau a de charge ke penyidik KPK.

Mereka ialah Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana FH Universitas Negeri Surabaya Aditya Wiguna Sanjaya; Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Beniharmoni Harefa; dan Ahli Hukum Tata Negara FH Universitas Islam Indonesia Idul Rishan.

Rencananya, ahli hukum tersebut akan menjelaskan ke penyidik KPK hasil eksaminasi yang dilakukan Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 3-4 Februari 2025 sesuai keahlian mereka.

Kata Ronny, ahli pidana akan menjelaskan tentang persoalan mendasar penyidikan KPK dalam kasus dugaan suap yang melenceng dari putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut, terang dia, tidak ditemukan keterlibatan Hasto sebagai pelaku.

Sedangkan ahli hukum tata negara akan menjelaskan perbuatan yang dilakukan Hasto sebagai Sekjen PDIP ke KPU adalah tindakan yang sah karena merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) dan fatwa MA.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diproses hukum KPK atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang memperlakukakan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari.\*

## Gubernur Andi Sumangerukka Meluncurkan 39 Program Quick Win 100 Hari ASR-Hugua Saat Pidato Perdana di DPRD, Berikut Daftarnya

Pewarta: Mashuri

SULTRA, BP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat paripurna masa sidang ke-2 tahun 2024-2025 dengan agenda utama penyampaian pidato sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2025-2030, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat DPRD Prov. Sultra, Senin, 3 Maret 2025.

Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Taria, S.Pd., beserta segenap pimpinan dan anggota DPRD Sultra. Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua turut serta dalam acara ini, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat I Sultra dan para pimpinan kementerian/lembaga yang berada di Sulawesi Tenggara.

Selain itu, hadir pula para bupati dan wali kota se-Sultra, Para ketua partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Sekretaris Daerah Sultra, Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sultra, Danlanud Haluoleo, Danlanal Kendari, serta para pejabat sipil, TNI, dan Polri turut hadir.

Hadir pula para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, Ketua Pengadilan Agama, serta pimpinan instansi vertikal seperti Kanwil Kemendikbud, Kepala OJK Sultra, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Dari unsur akademisi dan organisasi masyarakat, hadir Rektor Universitas Haluoleo atau perwakilannya, Ketua KPU Sultra, Ketua Bawaslu Sultra, Ketua Kadin Sultra atau perwakilannya,



serta para pimpinan organisasi non-pemerintah.

Dalam pidatonya, Gubernur Andi Sumangerukka mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sultra atas inisiasi penyelenggaraan rapat paripurna perdana di awal masa kepemimpinannya. Ia juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Muslim.

"Kami menyadari bahwa amanah ini bukanlah tugas ringan, tetapi dengan dukungan semua pihak, terutama DPRD sebagai mitra strategis, kami yakin dapat membawa Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih maju dan sejahtera," ujar Gubernur ASR.

Dalam masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua, Gubernur ASR menegaskan lima fokus utama yang akan menjadi prioritas pembangunannya:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Memperkuat infrastruktur dan konektivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk pembentukan klaster ekonomi, pariwisata, dan irigasi. Kota Kendari akan dikembangkan menjadi ikon Sulawesi Tenggara yang lebih modern dan menarik.

3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, agar masyarakat memiliki daya saing yang tinggi.

4. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, untuk kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang.

5. Reformasi birokrasi, guna menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani rakyat.

Sebagai bentuk komitmen awal dalam memimpin Sulawesi Tenggara, Gubernur ASR juga meluncurkan 39 program Quick Win 100 Hari ASR-Hugua, di antaranya:

01. Rapat pimpinan akselerasi pelaksanaan program 100 hari

02. Pengendalian inflasi

03. Mitigasi dan penanggulangan bencana

04. Sertifikat halal untuk UMK

05. Mantu (Modal Usaha untuk Ibu-Ibu)

06. Beasiswa untuk Generasi Sulawesi Tenggara

07. Penggaris (Perlengkapan dan Seragam Sekolah Gratis)

08. Sultra Health Service (Asuransi Kesehatan Gratis untuk Masyarakat)

09. Layanan Ambulans Darat dan Laut Gratis

10. Sultra Sport Fest

11. Jamaah (Jalan Mulus Antar Wilayah)

12. Rehabilitasi

DAS

13. Agrokompleks (Bantuan Pupuk, Benih, Alsintan)

14. Hibah Ormas

15. Penyerahan Sertifikat Tanah

16. Rancangan Per-gub "Satu Data, Satu Peta, Satu Kebijakan"

17. Job Fair "Semua Mudah Dapat Kerja"

18. Launching Desa Ketahanan Pangan

19. Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah

20. Monitoring Pelayanan Kesehatan

21. Penandatanganan Pakta Integritas

22. Laporan 100 Hari Hasil Kerja ASR-Hugua dan Proyeksi Kinerja Ke Depan

23. Perluasan Infrastruktur Penyediaan Air Bersih

24. Pembangunan Sarana Sanitasi

25. Peresmian Monumen Pahlawan Oputa Yi Koo

26. Co-Creating SPAM, SPLAD, TPA Regional, dan Drainase Kota

27. Aktivasi Infrastruktur Kepulauan

28. Digitalisasi Layanan Transportasi dan Pelayanan Kepelabuhanan

29. Mudik Gratis

30. Sultra Mandiri Energi

31. Investment Summit

32. Gov Award

33. Pekan Literasi Sultra

34. Sultra Story-nomics Tourism

35. Layanan Pajak "Sigap"

## ASR-Hugua Gelar Buka Puasa Bersama, Raih Berkah Ramadan Torehkan Harapan dan Komitmen Kepemimpinan ASR-Hugua



Pewarta: Amran

SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua menggelar acara buka puasa bersama di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Jumat (1/3/2025). Acara ini mengusung tema "Tebarkan Kebahagiaan dengan Silaturahmi, Raih Berkah Ramadan", yang bertujuan mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dengan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Dalam acara ini, turut hadir Ketua DPRD Prov. Sultra, Forkopimda bersama Istri, Sekretaris Daerah, Para Kepala OPD Lingkup Pemprov Sultra bersama istri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, serta pejabat terkait. Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, Mantan Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh, juga hadir dalam kesempatan tersebut, yang mendapat apresiasi langsung dari Gubernur ASR.

Dalam sambutannya, Gubernur ASR memperkenalkan diri bersama istri, Arinta Anila Apsari, beserta putranya. ASR yang lahir di Sulawesi

36. Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah

37. Rekonsiliasi BUMD Sulawesi Tenggara

38. Musrenbang

39. Penguatan sektor pertanian dan perikanan agar Sultra menjadi lumbung pangan di Sulawesi

Di akhir pidatonya, Gubernur Andi

Selatan, namun besar di Sulawesi Tenggara, menceritakan perjalanan kariernya di dunia militer hingga akhirnya dipercaya sebagai pemimpin daerah. "Saya sudah bertugas di berbagai tempat, dari Komandan Batalyon hingga Pangdam. Namun, kembali ke Sulawesi Tenggara sebagai gubernur adalah amanah yang harus saya jalankan sebaik-baiknya," ujar ASR.

Gubernur juga mengenang perjalanan hidupnya, termasuk kisah pertemuan dengan sang istri yang terjadi saat dirinya berdinasnya sebagai perwira militer. Dalam kesempatan itu, ASR menegaskan komitmennya untuk bekerja keras demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, juga turut memberikan sambutan. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat dan berharap kepemimpinan Gubernur ASR akan membawa perubahan positif bagi Sulawesi Tenggara.

"Di balik keberhasilan seorang pemimpin, ada perempuan hebat yang mendukungnya. Saya yakin, bersama-sama kita bisa membangun daerah ini lebih baik lagi," ungkap Hugua.

Sumangerukka menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program yang diusungnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada ke-

Acara ini diawali dengan kultum yang memberikan pesan-pesan Ramadan kepada seluruh tamu undangan. Setelah itu, para hadirin melaksanakan buka puasa bersama, dilanjutkan dengan salat Maghrib berjamaah.

Momentum kebersamaan semakin terasa saat perkenalan resmi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra dilakukan. Para tamu undangan kemudian menikmati makan malam bersama sebelum melaksanakan salat Isya dan Tarawih berjamaah.

Dalam sambutannya, ASR menegaskan bahwa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Hugua akan berorientasi pada kerja nyata dan sinergi dengan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk menjalankan program pembangunan di Sulawesi Tenggara.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan semua pihak agar amanah ini bisa dijalankan dengan baik. Kami akan berusaha keras agar kepemimpinan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat," tutup ASR.

Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan momentum Ramadan dapat menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan membangun kebersamaan dalam membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik. (\*)

pentingan rakyat. Dengan semangat gotong royong, mari kita bangun Sulawesi Tenggara yang lebih maju dan sejahtera," tegasnya.

Mari bersama-sama mendukung pembangunan Sulawesi Tenggara yang lebih baik! (\*)

## Dinas Ketahanan Pangan Buton Utara Gelar Sidak di Pasar Minaminanga Pastikan Pangan Aman dan Harga Stabil Selama Ramadan



### Laporan : Kasrun

BURANGA, BP-Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Minaminanga, Kecamatan Kulisusu, pada Senin, 3 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan keamanan pangan bagi masyarakat selama bulan Ramadan. Sidak ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Buton Utara, Sadaria, bersama jajaran pegawai dinas terkait.

Dalam sidak tersebut, Sadaria dan timnya memantau berbagai bahan pangan, termasuk daging, ikan, ayam, serta kebutuhan pokok lainnya. Selain memastikan stok pangan mencukupi, pihaknya juga mengecek harga-harga agar tidak terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa.

“Kegiatan ini kami lakukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat

selama bulan Ramadan. Kami juga menghibau para pedagang untuk menjaga kualitas barang dagangan dan tidak menaikkan harga secara berlebihan,” ujar Sadaria di sela-sela kegiatan.

Hasil sidak menunjukkan bahwa stok pangan di Pasar Minaminanga terpantau aman dan mencukupi. Namun, pihak dinas akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna memastikan kestabilan harga dan ketersediaan barang hingga menjelang Idul Fitri.

Warga yang ditemui di pasar menyambut baik kegiatan ini. Mereka berharap langkah proaktif dari Dinas Ketahanan Pangan dapat terus dilakukan, terutama dalam memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil selama Ramadan.

Dengan adanya sidak ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pangan serta memberikan rasa tenang bagi masyarakat dalam menjalani ibadah puasa.

## Bupati Butir Afirudin Mathara Hadiri Sertijab Gubernur Sultra: Selamat Bertugas Pak Gubernur Terpilih



### Laporan : Kasrun

SULTRA, BP-Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2025-2030 yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (3/3/2025).

Kehadirannya mewakili Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk memenuhi undangan dari Pemerintah Provinsi Sultra.

Melalui akun Facebook resminya, Afirudin menyampaikan ucapan

selamat bertugas kepada Gubernur terpilih, Mayjend. TNI (Purn.) Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian dan pengabdian Penjabat Gubernur sebelumnya, Andap Budhi Revianto, yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Sulawesi Tenggara.

“Selamat bertugas Pak Gubernur ASR-Hugua dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian

Bapak Andap Budhi Revianto dalam membangun Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami, masyarakat, tidak akan pernah melupakan jasa-jasa Pak Jenderal,” tulis Afirudin.

Sertijab ini ditandai dengan penyerahan Memori Jabatan dari Andap Budhi Revianto kepada Andi Sumangerukka. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah serta tamu undangan lainnya.

Kehadiran Afirudin pada Sertijab Gubernur Sultra merupakan agenda kedua setelah dirinya bersama Rahman dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Periode 2025-2030.

Sebelumnya, keduanya juga mengikuti acara Retret Kepala Daerah di Magelang yang berlangsung sejak 21 Februari hingga 28 Februari 2025.

Dengan semangat baru, Afirudin berharap

sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buton Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat semakin kuat demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

## Alvin - Syarif Tiba di Buton disambut Pengalungan Bunga dan Penyematan Kampurui



### LAPORAN: RAHIM

BUTON, BP-Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH dan Wakil Bupati Buton Syarifuddin Saafa ST tiba di Kabupaten Buton melalui Bandara Betoambari, Kota Baubau, Selasa sore 4 Maret 2025. Bupati dan Wakil Bupati Buton tiba di Buton usai dilantik Istana Kepresidenan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, Kamis 20 Februari 2025 dan mengikuti Retret di Akmil Magelang 21 - 28 Februari 2025. Alvin-Syarif satu pesawat dengan Walikota dan Wakil Walikota Baubau dan Anggota DPR RI Dapil Sultra, yang juga mantan Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, SH.

Sesaat turun dari pesawat, H. Ali Mazi, SH, Alvin - Syarif, HYF-Hamsina disambut dengan prosesi pengalungan bunga dan pemakaian Kampurui oleh tokoh adat setempat sebagai simbol penghormatan dan doa restu bagi kepemimpinan yang baru. Setelah pengalungan Bunga, dan Kampurui, Rombongan disambut dengan Tari Galangi.

Rombongan Anggota DPR RI, Bupati dan Wakil Bupati Buton, Walikota dan Wakil Walikota Baubau disambut Sultan Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton, YM. Drs. H. La Ode Muhammad Kariu.

Turut menyambut Sekda Buton, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat lingkup Kabupaten Buton dan Kota Baubau serta para pendukung dan Masyarakat kedua daerah tersebut.

Setelah prosesi penyambutan di Bandara Baubau, Bupati dan Wakil Bupati langsung bertolak menuju

Kabupaten Buton untuk melanjutkan acara dengan silaturahmi bersama masyarakat dan jajaran pemerintahan Kabupaten Buton.

Di kediaman Bupati Buton, acara dilanjutkan dengan Byuka Puasa Bersama, Makan Malam.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Alvin Akawijaya Putra menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh masyarakat Buton. Ia mengemukakan komitmennya untuk membangun daerah bersama Wakil Bupati Syarifuddin Saafa dan seluruh elemen masyarakat.

“Saya sangat senang, terharu dan bangga dengan sambutan luar biasa dari masyarakat Buton yang telah menyambut dan menerima kami di bandara. Masyarakat begitu sangat antusias. Kami dipilih oleh Masyarakat dan itu adalah Amanah. Dan tugas kami sekarang adalah bagaimana membuat Masyarakat bahagia,” kata Bupati Buton.

Dikatakan Bupati Buton, Langkah pertama dalam 100 hari pemerintahannya, akan focus pada penyempurnaan visi misi pemerintahan.

Sementara itu, Wakil Bupati Syarifuddin Saafa juga berterimakasih kepada masyarakat yang telah menerima kedatangan pimpinan baru di Tanah Buton dengan sambutan yang sangat hangat. Ia juga berharap agar sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus terjalin erat demi kesejahteraan bersama.

Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Buton ini menandai awal perjalanan kepemimpinan mereka dalam membawa Buton menuju masa depan yang lebih sejahtera.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**Jl. GAJAH MADA LAWELA SELATAN, BATAUGA, TLP 0811407036**

**PENGUMUMAN TENTANG SURAT SERTIFIKAT HILANG**  
**Nomor : 01/2025**

Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti Sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nama/Alamat Pemohon	Hak Atas Tanah, Jenis dan Nomor Hak	NIB	Terdaftar atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Jalan b. Kel/Desa c. Kec	Keterangan
01	AMINUDIN Jl Simponi Rindu Imbrairiri	hak Milik No.- Kel. -	21150110100625	AMINUDIN	12/01/2015	Luas: -	Berdasarkan surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor: SKTLK/84/II/2025/SPKT/Polsek batauga/Polres Buton di Pasarwajo/Polda Sulawesi tenggara Tanggal 27/02/2025 dan Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji tanggal 06/03/2025

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut diatas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 338/2025  
Nama Pemohon : AMINUDIN  
DI 301 : 44/2025

Batauga, 06 Maret 2025  
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan  
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ttd

**MOHAMAT HASRUL ASWIT, S.TR**  
NIP. 198911302009031001

## Kemenkes Serahkan Laporan Keuangan Unaudited ke BPK



### Laporan: Warman

JAKARTA-Kementerian Kesehatan RI resmi menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Selasa (4/3). Penyerahan laporan ini dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

Sekjen Kunta mengatakan laporan keuangan yang diserahkan terdiri dari beberapa komponen penting. Di antaranya adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

"Secara keseluruhan, laporan keuangan tersebut telah diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan laporan yang disampaikan, pendapatan Kemenkes tercatat mencapai sekitar 110% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja yang dikeluarkan Kemenkes tercatat sekitar 95% dari anggaran yang telah disusun.

Nilai aset Kemenkes per 31 Desember juga tercatat mengalami kenaikan signifikan," ujar Sekjen Kunta.

Aset yang dimiliki Kemenkes mencapai 120,9 triliun, menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik.

Selain itu, Sekjen Kunta juga memberikan informasi terkait progres tindak lanjut (TL) dari ha-

sil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Sekitar 95,48% tindak lanjut dari LHP BPK sudah berhasil diselesaikan. Sedangkan tindak lanjut dari LHP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tercatat mencapai sekitar 98,04%, dan tindak lanjut dari LHP Inspektorat Jenderal (Itjen) sekitar 94%. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Kemenkes.

Sekjen Kunta juga menegaskan komitmen kementerian untuk terus melakukan percepatan dalam penyelesaian tindak lanjut tersebut.

"Kami akan terus bekerja keras untuk menyelesaikan semua tindak lanjut yang belum selesai," ucapnya.

Di samping itu, Kemenkes juga berupaya menjaga kualitas laporan keuangan yang telah disusun. Berdasarkan temuan-temuan yang muncul pada pemeriksaan sebelumnya, perbaikan-perbaikan terus dilakukan untuk menghindari terjadinya temuan berulang pada laporan-laporan keuangan di masa mendatang.

Kemenkes terus berkomitmen untuk mengoptimalkan sistem pengendalian intern di kementerian tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui penerapan

dan penilaian pengendalian intern secara berkala untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang semakin baik.

"Upaya untuk menjaga kualitas laporan keuangan ini merupakan bagian dari komitmen kementerian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih," kata Sekjen Kunta.

Peningkatan kualitas laporan keuangan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenkes.

Kemenkes juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Melalui transformasi yang telah dilakukan, diharapkan semakin banyak perbaikan yang bisa dicapai. Kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah semakin hari semakin meningkat. Diharapkan, kualitas laporan keuangan ini bisa semakin baik dari tahun ke tahun, seiring dengan upaya perbaikan yang terus dilakukan.

Dengan segala upaya yang terus dilakukan, Kemenkes berkomitmen untuk mencapai tujuan akhir yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. (\*)

## Minim Anggaran, Alat RSUD Buton Utara Tak Terawat



### Laporan: Kasrun

BURANGA, BP-Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Utara, Dokter Forta Nita, mengungkapkan buruknya perawatan alat-alat medis di RSUD disebabkan oleh minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Forta Nita saat diwawancarai wartawan di halaman Aula Bappeda usai serah terima jabatan Bupati dari Ridwan Zakariah ke Afrudin, Kamis (6/3/2025).

"Kalau mau fasilitasnya bagus, anggaran juga harus dipenuhi," tegasnya.

Forta Nita membeberkan, setiap tahun RSUD hanya menerima setengah dari anggaran yang diajukan. Sebagai contoh, pihak rumah sakit membutuhkan Rp16 miliar, namun hanya diberikan Rp8 miliar.

Akibatnya, banyak kebutuhan rumah sakit yang tak tercover hingga pertengahan tahun, termasuk jasa medis yang belum terbayar sejak 2024.

"Contohnya begini kita butuh 16 M, kita

dikasih hanya 8 M. Otomatis kan pertengahan tahun habis-habisan. Itu kan jasa medis sampai sekarang belum kebayar. Tahun 2024," ucapnya.

"Tiap tahun hanya dikasih separuh oleh pemerintah daerah," ungkapnya.

Ketika ditanya soal rincian anggaran, Forta Nita enggan menyebutkan angka pasti. Namun, ia menekankan, kondisi ini berdampak serius pada layanan kesehatan masyarakat.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh akun Facebook

La Ode Andri, yang menyoroti buruknya kondisi fasilitas RSUD seperti kursi roda, tempat tidur, kipas angin, dan tempat sampah yang tidak terawat.

Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati, Afrudin Mathara-Rahman, segera turun tangan memperhatikan kondisi rumah sakit.

"Tolong rumah sakit kita dilihat dulu, masyarakat banyak yang mengeluhkan, tapi mau bicara sama siapa," tulis La Ode Andri di akun Facebook-nya. (\*)

## Kemenkes Ajak Masyarakat Peduli Kesehatan Pendengaran

### Laporan: Yeti

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia (World Hearing Day/ WHD) yang diperingati setiap tanggal 3 Maret, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih peduli

terhadap kesehatan telinga. Upaya ini merupakan bentuk dukungan terhadap komitmen global Sound Hearing 2030, yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi gangguan pendengaran di seluruh dunia.

Pada Media Briefing dalam rangka Hari Pendengaran Sedunia 2025, Plt. Direktur Jen-

deral Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, dr. Yudhi Pramono, menjelaskan bahwa tema internasional WHD 2025 adalah "Empower Yourself! Make Ear and Hearing Care a Reality for All".

Sementara tema nasionalnya adalah "Cegah Gangguan Pendengaran, Ayo Pedu-

liâ€. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan pendengaran, mencegah gangguan pendengaran, serta memahami bahwa gangguan pendengaran dapat dideteksi dan ditangani lebih awal sesuai dengan indikasi medis.

Menurut WHO, sekitar 1,57 miliar penduduk dunia mengalami gangguan pendengaran, menjadikannya penyebab disabilitas terbesar ketiga di dunia. "Saat ini, lebih dari 5% populasi dunia atau sekitar 430 juta orang memerlukan rehabilitasi pendengaran, termasuk 34 juta anak-anak. Pada tahun 2050, diperkirakan 2,5 miliar orang akan mengalami gangguan pendengaran pada tingkat tertentu, dan setidaknya 700 juta orang akan membutuhkan rehabilitasi pendengaran," jelas dr.

Yudhi. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa lebih dari 1 miliar orang dewasa muda berisiko mengalami gangguan permanen akibat kebiasaan mendengarkan suara dengan volume tinggi dalam jangka waktu lama.

"Diperlukan investasi tambahan sebesar 1,4 USD per orang per tahun untuk memastikan akses layanan kesehatan pendengaran dan telinga yang optimal," tambahnya.

Di Indonesia, hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa prevalensi disabilitas pendengaran pada usia 1 tahun sebesar 0,4%, dengan proporsi pengguna alat bantu dengar mencapai 4,1%. Artinya, 4 dari 100 orang di Indonesia adalah pengguna alat bantu dengar. Ini menun-

jukkan bahwa angka disabilitas akibat gangguan pendengaran cukup tinggi di Indonesia," jelas dr. Yudhi.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan pendengaran, Kementerian Kesehatan menerapkan empat pilar strategi, yaitu 1) Promosi Kesehatan; 2) Deteksi Dini; 3) Perlindungan Khusus; dan 4) Penanganan Kasus.

Upaya promosi kesehatan diarahkan agar masyarakat peduli untuk mencegah gangguan indera dengan menyebarkan informasi baik melalui media komunikasi, informasi dan edukasi maupun melalui penyuluhan atau kegiatan lainnya serta melibatkan masyarakat ikut berperan di dalamnya.

"Deteksi dini gangguan pendengaran dapat dilakukan upaya kesehatan

berbasis masyarakat melalui Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjangkau kasus gangguan pendengaran di masyarakat yang kemudian diujuk ke FKTP," ujarnya.

Pemerintah telah memulai program cek kesehatan gratis di Puskesmas. Program ini bisa dimanfaatkan untuk skrining pendengaran.

Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang saat ini sudah dilaksanakan di seluruh puskesmas, seperti FKTP maupun satuan pendidikan dengan paket skrining sesuai juknis dari PKG, yang termasuk skrining pendengaran,

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher Indonesia (PERHATI-KL) (\*)

<p><b>Kritik, Lugas, Independen</b></p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi</p>	<p><b>Pemimpin Umum :</b> Fauzan NWA  <b>Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi :</b> Ardi  <b>Redpel :</b> Hengky TA  <b>Korlip :</b> Hengky T.A  <b>Redaktur :</b> Alyakin, Kasrun  <b>Reporter :</b> Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna, Hafis, Harman Momi</p>	<p><b>Layouter :</b> Rlirin  <b>Pracetak :</b> Aditya  <b>Cetak :</b> Jamal</p>	<p><b>Penerbit :</b> PT. Faren Grafika  <b>Komisaris :</b> Erna Agule  <b>Direktur Utama :</b> Andina Latief, SKM  <b>Manager Keuangan :</b> Nabila D.A  <b>Manager Iklan dan Pemasaran :</b> Fauzan  <b>Kepala Sirkulasi :</b> Jamal  <b>Administrasi :</b> Salvana  <b>Security :</b></p>	<p><b>Kepala Biro Wakatobi :</b> Risman  <b>Kepala Biro Buton Utara :</b> Fauzan  <b>Kepala Biro Buton :</b> Rahman  <b>Kepala Biro Busel :</b> Salvana  <b>Kepala Biro Buteng :</b> Andini  <b>Kepala Biro Bombana :</b>  <b>Kepala Biro Sultra :</b></p> <p><b>Kontributor Baubau :</b> Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr  <b>Kontributor Buton :</b> Kontributor Butur : Kasrun,  <b>Kontributor Buteng :</b> Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul</p>
	<p><b>Alamat Redaksi/ Tata Usaha :</b> Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau  <b>Tlp. 0402-2814207 - Email :</b> baubaupost2019@gmail.com  <b>Percetakan :</b> PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau</p>			<p><b>Baubau :</b> Jaya  <b>Agen Pasarwajo :</b>  <b>Agen Butur :</b> Samrihan</p> <p><b>Harga Langganan :</b> Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim, Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-</p>

## Tidak Ada Bukti Pungli Tes Kejiwaan PPPK, Polres Butur: Masih Proses Klarifikasi



Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Utara (Butur), dr. Wa Ode Forta Nita,

### Pewarta: Kasrun

BUTUR, BP-Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Utara (Butur), dr. Wa Ode Forta Nita, menegaskan, hasil pemeriksaan pihak kepolisian tidak menemukan bukti adanya dugaan pungli terkait tes kejiwaan bagi PPPK.

dr. Forta Nita men-

ungkapkan, pihak RSUD sebagai panitia penyelenggara telah dimintai keterangan oleh Polres Buton Utara.

“Sudah diperiksa di kepolisian, tidak ada bukti pungli. Jadi mau apa lagi?” tegasnya singkat usai menghadiri Sertijab Bupati di Aula Bappeda, Kamis (06/03/2025).

Namun, pernyataan berbeda disampai-

kan Kasat Reskrim Polres Buton Utara, AKP Juwanto. Ia menegaskan, proses klarifikasi masih berjalan.

“Sementara klarifikasi semua pihak, terkait anggaran yang digunakan untuk tes kejiwaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendapat Badan Keuangan Daerah (BKAD) Butur, Nur

Saban, menegaskan bahwa dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, tidak tercantum retribusi tes kejiwaan sebagai sumber penerimaan daerah.

“Dalam Perda tidak ada sumber pajak dari tes kejiwaan,” tegasnya.

Untuk diketahui, tes kejiwaan di Butur diikuti 648 peserta dengan tarif Rp 600 ribu per orang.\*

## Ketua KPK: Kepala Daerah Sebaiknya Kurangi Protokoler



Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyo mengingatkan kepala daerah mengurangi protokoler demi mendukung kebijakan efisiensi anggaran.

### Laporan: Hamid

JAKARTA-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyo mengingatkan kepala daerah mengurangi protokoler demi mendukung kebijakan efisiensi anggaran.

Hal itu disampaikan Setyo dalam peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (4/5). Sejumlah kepala daerah mengikuti agenda tersebut lewat daring atau Zoom.

Setyo lantas memberi contoh KPK sejak dirinya bergabung pada 2018 lalu sudah sangat efisien. Kata dia, tak banyak protokoler yang mendampingi

pejabat struktural dan pimpinan. Apalagi, pimpinan KPK juga tidak memakai kendaraan dinas.

“Protokoler sebaiknya dikurangi bapak ibu kepala daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangnya. Itu bagian dari efisiensi,” ujar Setyo.

“Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada Spri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot dan lain-lain, banyak sekali,” imbuhnya.

Setyo menyatakan protokoler yang banyak akan makin menuras anggaran.

“Bayangkan kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas. Gitu

ya. Saya kemarin ke Magelang hanya berdua saja tuh. Baik-baik saja. Alhamdulillah lancar, tidak ada masalah,” ucapnya.

Dalam sesi doorstep media, Setyo menyampaikan skor MCP tahun 2024 berada di angka 76. Naik satu poin dari tahun sebelumnya.

Skor MCP KPK adalah hasil pengukuran perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka pencegahan korupsi. Peluncuran MCP sekaligus memastikan standar minimal tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien dapat diterapkan di seluruh daerah.

Dalam menjalankan program tersebut,

KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kemudian skornya dari penilaian selama tahun 2024 itu diperoleh skor sebesar 76. Jadi, skor ini dibandingkan sebelumnya ada peningkatan 1 poin dari 75 ke 76,” kata Setyo.

MCP memotret delapan fokus area, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan optimalisasi pajak daerah.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah baik yang ada di provinsi, kota madya dan kabupaten yang sudah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan 8 fokus area tersebut. Tetapi, tentu kami juga berharap bahwa ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi,” ucap Setyo.

Setyo menyoroti poin pengadaan barang/jasa yang nilainya masih sangat jauh dari yang diharapkan yakni 68. Ia mengingatkan kepala daerah

## Kejagung Bantah Erick Thohir dan Boy Terlibat Kasus Pertamina



Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku tidak menemukan dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir serta, sang kakak, Giribaldi ‘Boy’ Thohir di kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.

Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung Harli Siregar menegaskan tidak ada informasi keterlibatan keduanya dari penyidik seperti informasi yang beredar di media sosial.

“Enggak ada informasi fakta soal itu,” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (5/3).

Ia lantas mempertanyakan dasar informasi yang menuding keterlibatan pihak tertentu dalam kasus tersebut. Pasalnya, kata dia, hal itu tidak berbasis pada fakta-fakta penyidikan.

“Dari mana sebenarnya informasi-informasi seperti itu,” tuturnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya juga membantah kabar adanya dokumen catatan hasil sitaan dari rumah saudagar minyak Riza Chalid yang bocor di media sosial.

Kepala Pusat Pen-

anganan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut isu adanya catatan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang bocor tidak benar dan menyesatkan.

“Itu tidak benar, bocor apanya, dan gesekan apa,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (4/3).

Hal tersebut disampaikan Harli merespon video viral di media sosial TikTok yang menyebut adanya dokumen catatan penyidik hasil pengecekan yang bocor.

Dalam video singkat tersebut dinarasikan bahwa dari catatan yang didapati penyidik terdapat keterlibatan sejumlah tokoh di kasus korupsi minyak Pertamina.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kemudian, SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping,

AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.

Selanjutnya MKN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, a DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan a YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

Terbaru yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga.

Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.

Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.\*

terpilih dapat memberi penekanan kepada seluruh pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan transparansi.

“Bahkan kami mendorong melakukan pengadaan secara konsolidasi,” imbuhnya.

Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya mengapresiasi langkah KPK terkait kerja-kerja pencegahan korupsi tersebut. Dalam kesempatan ini, ia mengatakan keberhasilan daerah juga ada peran besar dari Aparatur Penguasaan Intern Pemerintah (APIP).

“Terkait hal ini, per-

an APIP juga menjadi kunci karena tampilan daerah sangat dituntut bagaimana profesionalisme dari APIP. Kita minta support terus dari KPK,” kata dia.

Sementara itu, Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono menjelaskan pembangunan MCP merupakan salah satu bentuk dari sinergi dan kolaborasi pengawasan, terutama yang berkaitan dengan pencegahan korupsi yang ada di daerah.

Ia berharap kerja sama KPK, Kemendagri dan BPKP bisa mengurangi tin-

dak pidana korupsi di daerah.

“Peran kami khususnya BPKP adalah salah satu yang ditugaskan untuk melakukan penjaminan kualitas atas implementasi MCP yang ada di daerah. Secara kebetulan, delapan area yang menjadi fokus MCP ini sebagian besar memang menjadi fokus pengawasan BPKP,” ungkap Raden.

“Salah satunya terkait dengan perencanaan pengadaan. Kemudian optimalisasi pendapatan asli daerah, di mana sebagian besar pemerintah daerah masih mengandalkan sumber pembiayaan berasal dari dana transfer daerah,” pungkasnya.\*

## Agenda 100 Hari Kerja Yusran-Hamsinah Sentuh Kesejahteraan Masyarakat



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE didampingi Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc saat menggelar konferensi pers dengan sejumlah awak media Selasa malam (4/3/2025) di rujab Wali Kota Baubau mengatakan, agenda 100 hari kerja sudah ada program dan janji-janji semenjak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Baubau dan Wakil Wali Kota Baubau. Dan yang jelasnya agenda 100 hari kerja itu akan menyentuh kesejahteraan masyarakat.

Menurut H Yusran, setelah masuk kantor pada Rabu (5/3/2025, pihaknya akan melihat bagaimana postur anggaran dengan tujuan untuk memastikan apa yang menjadi target dalam 100 hari kerja pada pemerintahan-

nya yang menyentuh kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan. Selain itu juga akan melihat kondisi Kota Baubau terutama infrastrukturnya dan rencana-rencana terhadap pembangunan kedepannya.

Pada kesempatan tersebut, Yusran Fahim juga menjelaskan terkait pengalaman saat pelaksanaan retreat di Magelang yang tujuan utamanya itu adalah bagaimana pemerintah pusat memberi bekal kepada kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah yang begitu banyak. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah harus terkelola dengan baik.

Sedangkan terkait dengan perombakan kabinet, H Yusran Fahim mengaku belum terpikirkan. Namun yang akan dilakukan adalah bagaimana menggenjot apa yang diprogramkan den-

gan potensi yang ada sekarang ini, seperti di OPD tidak bisa hanya melihat ini tidak baik dan ini titipan.

“Bagaimana kita mau membongkar sementara kita belum ada didalamnya dan kita belum tahu juga dan hal itu tidak bijaksana, dan ketika sudah ada didalam maka kita akan lakukan pengkajian yang sudah ada dan apabila baik-baik saja maka kita tidak akan lakukan perombakan, karena yang kita butuhkan adalah orang-orang yang benar-benar mau bekerja, hanya saja apabila dia berada ditempat itu dan tidak mau bekerja maka kita harus ganti,” tegasnya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini juga menyinggung persoalan Sekda Kota Baubau yang sudah 2 tahun belum ada yang defenitif. Karena itu, akan dilakukan percepatan

karena prosesnya itu melalui assessment. Dan kemungkinan akan dilakukan lagi untuk Sekda definitif dan secepatnya itu akan dilakukan.

Ditempat yang sama, Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc menjelaskan, untuk rencana kedepannya tidak terlepas dari RPJMD Kota Baubau. Akan tetapi, fokus dulu pada 100 hari kerja itu akan dilakukan program yang 16 poin dan itu sudah merupakan hasil kajian dalam waktu singkat dengan kondisi di daerah. 16 poin itu tentu dengan pertimbangan yang ideal untuk kesejahteraan masyarakat dan ketika masuk dalam pemerintah akan lebih reel lagi diketahuai keadaannya, potensi SDM, potensi keuangan dan potensi yang lainnya. Dan yang jelas yang menjadi utama adalah kesejahteraan masyarakat. (\*)

## Disperindag Baubau Bakal Gelar Pasar Murah Selama Ramadan, Catat Waktu dan Tempat Pelaksanaannya

Laporan: Andina

BAUBAU, BP-Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Baubau bakal menggelar pasar murah Ramadhan 1446 H. Bahkan, pada Jumat (28/2/2025), Disperindag sudah menggelar rapat persiapan dengan mengundang pihak terkait seperti Distributor

Sembako, Bulog, Hypermart dan PT Pos dan Giro Baubau.

Kepala Dinas Perindag Kota Baubau melalui Sekdin H Nasir, S.Pd, M.Si dalam keterangan persnya mengatakan, semua Distributor, Bulog untuk bekerja sama dengan turut serta dalam pelaksanaan pasar murah selama bulan suci Ramadhan 1446

H akan dilaksanakan di beberapa tempat selain di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga ada beberapa titik seperti stadion, kotamara dan pasar berdikari.

Menurut H Nasir, dalam pasar murah Ramadhan tersebut akan dijual beberapa kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, gula, telur dan lain-lain,

yang harganya relatif murah, dengan harapan warga kota bisa memperoleh kebutuhan pokoknya selama bulan puasa dengan harga yang terjangkau. “Secara teknis bidang perdagangan akan menerbitkan jadwal pasar murah tersebut yang Insya Allah pekan depan akan mulai dilaksanakan,” katanya.

## Wawali Wa Ode Hamsinah: Pemkot Baubau Serius Dukung UMKM



Pewarta : Amat Jr

BAUBAU, BP-Mendukung Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bukti keharusan dan suatu keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau. Karena itu, UMKM harus naik kelas serta mempertahankan agar prodaknya tetap bertahan. Pasalnya, jika Pemkot Baubau tidak turut serta secara sungguh-sungguh mengawal kegiatan UMKM, maka pelaku-pelaku UMKM juga tidak berkembang.

Hal ini diungkapkan Wakil Wali (Wawali) Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc saat membuka acara Saung Ramadhan di Lippo Plaza Baubau Rabu sore (5/3/2025).

Menurut Wawali Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, membangun

dan membina serta memperkuat UMKM sudah terbukti dimana ketika Covid melanda, yang menopang perekonomian Indonesia adalah UMKM. Sehingga perekonomian tidak anjlok, bahkan tingkat pertumbuhan inflasi jauh lebih bagus dibanding dengan negara-negara lain. Tetapi di Indonesia ada UMKM yang tetap berjalan dan itulah yang terbukti bahwa UMKM lah yang menyelamatkan perekonomian Indonesia saat covid.

Dikatakan, Pemkot Baubau bersama-sama dengan pelaku UMKM menginginkan bahwa UMKM harus lebih berkembang terus lebih baik, mengingat bahwa Kota Baubau memiliki posisi geografis yang strategis karena Baubau merupakan pusat

pertumbuhan, baik dari ekonomi, pertumbuhan mobilisasi darat maupun laut dan sebagainya.

“Maka kita harus bisa membangkitkan UMKM, kita harus menaikkan UMKM ini menjadi ekonomi yang stabil, maju, inovatif dan berkelanjutan. Jadi ketika kami akan mendukung UMKM secara serius, maka itu adalah betul-betul,” katanya.

Hamsinah Bolu mengakui, Kota Baubau saat ini memiliki banyak kelebihan dan juga keterbatasan. Kemudian, Baubau bukan daerah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas untuk mendukung lahan industri pengolahan. Oleh sebab itu, dukungan Pemkot Baubau terhadap UMKM akan terus berkelanjutan untuk kemajuan UMKM di Baubau. (\*)



H Nasir menegaskan, agar harga di pasar murah itu sesuai dengan harga Distributor sehingga ada disparitas harga dengan di pasar.

Sementara itu, terkait dengan kehadiran PT Pos dan Giro Baubau, H Nasir mengungkapkan, kehadirannya merupakan instruksi dari Pimpinan untuk berperan memberikan bantuan berupa fasilitas yang secara teknis juga

akan dikondisikan sesuai tempat kegiatan tersebut.

**JADWAL KEGIATAN PASAR MURAH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BAUBAU TAHUN 2025**

03 maret s.d 06 maret

Halaman kantor Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Kota Baubau 11 maret s.d 13 maret

Lapangan Lembah Hijau Kel.Tomba Kec. Wolio

18 maret s.d 20 maret

Kotamara kel. N g a n a u m a l a Kec. Batupoaro

24 maret s.d 27 maret

Pasar Berdikari belakang Umna Plaza Jembatan batu Kel. Wale Kec. Wolio. (\*)